



IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN LUAAN KECAMATAN TONDANO TIMUR

Recky H. E. Sendouw¹, Jeane E. Langkai², Matthew Joel Pangerapan³

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: reckysendouw@unima.ac.id

Abstract

This study aims to describe the Policy Implementation of the Family Hope Program (PKH) in the Luaan Village, Tondano Timur District, Minahasa Regency. This study uses a qualitative approach. The results showed that: 1) PKH assistance was not on target due to invalid data. The data at the Center and at the Regions are out of sync and there is no periodic updating of data. 2) The distribution of PKH assistance was not timely; there are unscrupulous aid agents who reduce the quantity and quality of aid; and hampered because the Prosperous Family Card (KKS) often has errors due to invalid data. 3) PKH assistance will be very beneficial if it is received by truly deserving people. However, there are people who year after year continue to receive this assistance. This means that this program is not successful because it is not able to change the people's standard of living. The placement of aid recipients has not been recorded and evaluated continuously, so that the distribution of aid is not received by those who are entitled to it and the benefits so far have not had a big impact from the aid program obtained.

Keywords: Implementation, Policy, Family Hope Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Luaan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bantuan PKH tidak tepat sasaran karena data yang tidak valid. Data di Pusat dan di Daerah tidak sinkron dan tidak ada pemutakhiran data secara berkala. 2) Penyaluran bantuan PKH tidak tepat waktu, adanya oknum pendamping yang mengurangi kuantitas dan kualitas bantuan, serta terhambat karena Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sering terjadi kesalahan akibat data yang tidak valid. 3) Bantuan PKH akan sangat bermanfaat jika diterima oleh orang yang benar-benar berhak. Namun, ada saja orang yang dari tahun ke tahun terus menerima bantuan ini. Hal ini berarti program ini tidak berhasil karena tidak mampu mengubah taraf hidup masyarakat. Penempatan untuk penerima bantuan belum didata dan di evaluasi secara terus menerus, sehingga penyaluran bantuan tidak didapatkan oleh yang berhak dan manfaat yang selama ini belum memberikan dampak besar dari program bantuan yang didapatkan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program Keluarga Harapan

PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga Negara secara terencana, terarah, dan berkelanjutan (Laloan, 2020). Dalam bidang pendidikan, pemerintah menetapkan program wajib belajar sembilan tahun, dengan enam tahun dihabiskan di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun dihabiskan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Adanya program yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

PKH adalah program pemberian bantuan, untuk menjadi keluarga penerima PKH, Keluarga Miskin (KM) harus memenuhi syarat-syarat tertentu. (Timmerman, 2021). Program ini memberikan dukungan keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai imbalan atas kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH menawarkan kepada keluarga berpenghasilan rendah akses ke berbagai fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan (faskes) di daerah, khususnya untuk anak-anak dan ibu hamil. Berbagai bantuan yang diberikan melalui beberapa program yang berdampak besar bagi masyarakat dalam memproleh bantuan kesejahteraan dan layak. Dengan program tersebut, banyak sekali manfaat yang akan didapatkan seperti kebutuhan dalam rumah tangga.

Program keluarga harapan (PKH) di kecamatan Tondano Timur terlebih khusus di Kelurahan Luaan, menerima bantuan (PKH) sejak dari tahun 2014 sampai sekarang serta bantuan yang di berikan dari program (PKH) yaitu berupa sembako dan ada juga penerima yang di berikan bantuan dengan cara di uangkan agar untuk bisa membeli kebutuhan pokok yang di perlukan setiap keluarga maupun setiap masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH), penerima program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Luaan menerima bantuan setiap trisemester atau 3 bulan sekali serta program keluarga harapan (PKH) masih berjalan sampai sekarang di Kelurahan Luaan. Akan tetapi masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti KPM mempergunakan untuk keperluan lain. Padahal tujuan (PKH) adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, untuk itu di perlukan kontribusi pendampingan (PKH) dalam mendampingi KPM untuk melakukan tranformasi perubahan kesejahteraan hidup.

Di kecamatan Tondano Timur penerima program keluarga harapan (PKH) berdasarkan data yang tercantum di DTKS pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 493 orang (ini jumlah keseluruhan penerima yang ada di Kecamatan Tondano Timur) sedangkan yang

ada di kelurahan Luaan penerima PKH yaitu 23 orang dan semua ini yang terdaftar di di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Tujuan PKH adalah untuk menjadi hub dan pusat keunggulan nasional untuk mengurangi kemiskinan dengan memadukan inisiatif perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional yang beragam. Tujuan PKH, khususnya: (1) Meningkatkan akses dan kepuasan peserta terhadap layanan pendidikan dan kesehatan; (2) Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH (Rengkuan, 2022). Selain itu, bertujuan untuk memberikan kebutuhan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagi penerima yang berhak dalam memperoleh bantuan dari program pemerintah tersebut. Penyaluran bantuan harus mencerminkan nilai-nilai yang baik kepada yang berhak, sehingga bukan terkesan untuk membedakan status sosial. Dengan demikian, program tersebut bisa diimplementasikan secara transparan dan berkonsep keadilan yang merata.

Menurut temuan pengamatan peneliti, terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya peserta program KK yang tidak berdaya dan tinggal di rumah yang tidak layak huni, dengan keadaan ekonomi tersebut membuat beberapa anak terancam putus sekolah. Selain itu, bantuan PKH belum menjangkau seluruh masyarakat miskin di Desa Luaan sehingga menimbulkan persaingan sosial antar masyarakat serta keterlambatan pelaksanaan kebijakan PKH karena keterbatasan dana, dan juga di bidang pendidikan ini masih ada beberapa peserta PKH yang mengumpulkan data lama atau hasil belajar yang lama (Rapor) dan juga ada beberapa anak penerima bantuan PKH ini tidak lanjut sekolah, tapi masih mendapatkan bantuan PKH. Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian terhadap “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan agar masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur. Fokus penelitian ini memiliki 3 sub fokus yang akan di bahas di antaranya yaitu: mekanisme penetapan kelompok, penyaluran PKH, pemanfaatan PKH. Sumber data, dalam penelitian ini ada 2 yaitu: data primer, data yang dihasilkan melalui wawancara dan hasil responden dari narasumber dan data sekunder yang mencakup informasi dan data-data di Kelurahan Luaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu:

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)...

Sendouw R. H. E, Langkai J. E, Pangerapan M. J (2023)

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung mengenai fenomena sosial, masalah, dan gejala untuk dicatat.
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab secara mendalam dengan informan untuk memperoleh data akurat.
- c. Dokumentasi, teknik mengumpulkan data melalui dokumen tertulis maupun yang terekam

2. Teknis analisis data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap dalam melakukan analisis data diantaranya yaitu:

- a. Reduksi data, mengumpulkan data dan memilih hal-hal pokok.
 - b. Penyajian data, membantu menyusun data agar mudah dikategorikan.
 - c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan
- ### 3. Keabsahan data

Sugiyono ada 4 kriteria untuk menguji keabsahan data kualitatif yaitu, 1) Uji Kredibilitas (Uji Kepercayaan), 2) Pengujian *Transferability* (nilai transfer), 3) Pengujian *Dependibility* (ketergantungan) 4) Pengujian *Confirmability* (kepastian) (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur yang mengandung beberapa sub fokus penelitian penting dan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang akan menentukan apakah program keluarga harapan (PKH) dalam bidang Pendidikan sudah diterapkan yaitu:

1. Penetapan Kelompok Sasaran

Salah satu proses yang melengkapi mekanisme pelaksanaan PKH agar dapat dilaksanakan secara penuh adalah seleksi calon peserta PKH. Penggunaan strategis sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah disebut sebagai kebijakan publik (Takalentangen, 2021) . Kebijakan publik adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus untuk kepentingan kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar dapat hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Fakta dilpanagan ditemukan berbagai item yang dilaporkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui surveilans dan wawancara. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dijelaskan

bila dikaitkan dengan teori di atas, bahwa Syarat dan tata cara pemilihan calon penerima manfaat PKH dituangkan secara jelas dalam Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Jaminan Perlindungan dan Sosial PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Namun, peneliti menemukan kendala di lapangan, khususnya ketidakkonsistenan dalam mengidentifikasi data pengguna bantuan PKH. Peneliti menemukan, misalnya, bahwa pemohon manfaat PKH tertentu tidak dapat memperoleh bantuan karena data yang tersedia di DTKS berbeda dengan yang tersedia di Capil. Kemudian ada KPM PKH di Desa Luanan yang menerima dana bantuan pendidikan yang tidak mencukupi untuk tingkat sekolah yang mereka layani sekarang. Pada situasi pertama, mungkin karena masalah input data petugas (human error). Sementara pada kasus kedua, hal ini terjadi karena pemerintah tidak melakukan pemutakhiran atau pemutakhiran data secara berkala, sehingga kemungkinan masih ada penerima PKH yang terus menerima bantuan dari tahun ke tahun (berdasarkan wawancara dengan informan) meskipun taraf hidup mereka meningkat, bukan seperti ini.

2. Penyaluran PKH

Penyaluran bantuan sosial PKH berupaya untuk mendukung keluarga miskin, kurang mampu, dan rentan yang rentan terhadap bencana sosial, apalagi program PKH merupakan program nasional yang dapat membantu keluarga miskin di Indonesia dan mengentaskan kemiskinan.

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) meliputi: pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH, sosialisasi dan edukasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera, proses penyaluran Bantuan Sosial PKH, penarikan dana Bantuan Sosial PKH, rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran Bantuan Sosial PKH (Fitria & Amberi, 2020).

Berdasarkan temuan kajian teori, bantuan PKH disalurkan dalam bentuk tunai, artinya dalam bentuk uang, dan non tunai, yaitu dalam bentuk sembako. Bantuan tunai diadministrasikan melalui bank BRI dan diterima langsung oleh KPM PKH dengan cara tarik tunai di ATM menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera, yaitu kartu ATM khusus nasabah bansos PKH. Namun, penyaluran dana bantuan PKH seringkali terkendala oleh kesalahan KKS. Bantuan nontunai kemudian disalurkan melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Sebaliknya, oknum pemberi bantuan melakukan kecurangan yang berdampak pada masyarakat penerima PKH. Selanjutnya waktu penyaluran tidak tetap, seharusnya 4 bulan

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)...

Sendouw R. H. E, Langkai J. E, Pangerapan M. J (2023)

sekali tetapi sering molor dari waktu seharusnya. Keterlambatan atas bantuan program adalah masih kurangnya implementasi program, tentu ini juga akan menimbulkan kegelisahan dan transparansi terhadap penyaluran bantuan pemerintah tersebut. Keterlambatan bantuan harus dinformasikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga tidak terdapat kabar buruk dari penyelenggara maupun penerima.

3. Pemanfaatan PKH

Dengan memberikan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat terhadap layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan, PKH berharap dapat meningkatkan taraf hidup mereka. manfaat produk dan layanan keuangan formal bagi keluarga penerima manfaat; menurunkan beban keuangan dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; mengubah cara keluarga penerima manfaat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sasaran PKH adalah keluarga berpenghasilan rendah dan/atau individu rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu program penanggulangan kemiskinan, yang mencakup komponen kesejahteraan sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan. (Pratama & Mudarya, 2021).

PKH digunakan untuk memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku yang tidak mendukung kesejahteraan populasi yang paling rentan. Tujuan jangka pendek program ini adalah untuk meringankan beban RTSM, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga generasi muda dapat terbebas dari siklus kemiskinan. Sistem penyelenggaraan bantuan pemerintah melalui program diharapkan bisa memberikan peluang dan pencerahan bagi masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan hidup yang lebih cerah untuk masa yang akan datang.

Ada orang yang menerima bantuan PKH selama bertahun-tahun, menurut data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan informan. Karena ada masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi bantuan namun tetap menerimanya karena kurangnya pengawasan pemerintah, maka program bantuan ini tidak berhasil karena tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika demikian, pemerintah dapat mencari cara lain untuk membantu lingkungan. Tidak hanya uang atau kebutuhan dasar, tetapi juga pelatihan untuk memperkuat kemampuan tertentu, atau dalam hal ini bantuan pendidikan, yang mungkin secara langsung berupa komoditas yang mempromosikan pendidikan anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka simpulan dalam penelitian ini bahwa penggunaan bantuan PKH tidak efisien, bukan karena tantangan dalam memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan. Kenyataannya, dibandingkan dengan lokasi lain di Indonesia Timur, fasilitas kesehatan dan pendidikan di sekitar Desa Luaan cukup dapat diterima. Namun yang menyebabkan ketidakefektifan pemanfaatan bantuan PKH adalah karena sebagian penerima bantuan ini tidak tepat sasaran, karenanya pemanfaatan bantuan PKH ini tidak sesuai dengan data dilapangan sebagai penerima bantuan yang seharusnya. Penempatan untuk penerima bantuan belum didata dan di evaluasi secara terus menerus, sehingga penyaluran bantuan tidak didapatkan oleh yang berhak dan manfaat yang selama ini belum memberikan dampak besar dari program bantuan yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, N., & Amberi, M. (2020). Pengaruh Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.4.1.87-96>
- Laloo, I. A., Kairupan, S. B., & Langkai, J. (2020). *Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan*. 2(2), 1–7.
- Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pratama, P. D. W., & Mudarya, I. N. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng. *Locus*, 13(2), 62–78. <https://doi.org/10.37637/locus.v13i2.769>
- Rengkuan, G., Dilapanga, A. R., & Rantung, M. (2022). *Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tataaran I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahas*. 4(1), 40–45.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Takalantengen, A., Dilapanga, A. R., & Mandagi, M. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado. *Jambura Journal of ...*, 1–14.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Timmerman, M. I., Sambiran, S., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Penanganan Covid-19 Di

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)...

Sendouw R. H. E, Langkai J. E, Pangerapan M. J (2023)

Kelurahan Mahakeret Barat. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.

Mukarom, Zaenal, Muhibudin. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Era globalisasi : teori, proses, dan studi kasus komparatif*. Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic publishing service).

Safroni, M Ladzi. (2012). *Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya media.